

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amriani Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria : isi dan pelaksanaan*. Djambatan. Jakarta.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1985. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur.
- M. Arba. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. P.T Alumni. Bandung.
- Soerjono soekanto. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. CV.Rajawali. Jakarta.
- Zainuddin Ali,M.A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

### B.UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14/1982 tanggal 06 Maret 1982 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2584 tanggal 14 April 1988 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan hak Atas Tanah

Surat Direktur Jendral Agraria Nomor 594/1492/Agr tanggal 31 Maret 1982 tentang Penerbitan Surat Kuasa Mutlak

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

### C.SKRIPSI

Sari Yunita. 2010. *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Zakiah Haphara. 2015. *Akibat Hukum Praktek Jual-Beli Tanah Yang Tidak Bersertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Pauh Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

### D.INTERNET

[http://lbhamin.org/Perbuatan Melawan Hukum/](http://lbhamin.org/Perbuatan_Melawan_Hukum/) diakses pada tanggal 17 Oktober 2017

pukul 17.00 WIB

